

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Diskursus hubungan demokrasi dan media sosial semakin beragam dari waktu ke waktu. Dari perspektif dampak, mayoritas akademisi yang pada awalnya sepakat bahwa media sosial memiliki dampak positif terhadap demokrasi, kini menjadi lebih berimbang. Hal ini dipicu oleh kemunculan beberapa preseden negatif dan pembicaraan terkait hal ini mulai banyak diintrodusir dalam perbincangan ilmiah yang berkisar pada pertanyaan: apakah model media sosial yang ada saat ini baik bagi demokrasi?

Perbedaan pendapat mengemuka, sebagian secara rigid memosisikan diri pada kutub tertentu dan sebagian lagi lebih fleksibel. Belahan rigid tersebut setidaknya terbagi atas dua kutub: utopia dan distopia. Di kutub utopia Fabrizio Gilardi salah satunya yang melihat bahwa teknologi digital mampu mengubah praktik demokrasi—adanya perubahan pola partisipasi politik masyarakat yang membuat kualitas demokrasi semakin meningkat (Gilardi, 2016:3). Sementara di kutub lain Howard Nothhaft menjelaskan bahwa teknologi baru ini tidak memiliki sifat yang demokratis—cenderung merusak sendi-sendi demokrasi yang selama ini ada. Bukan tanpa alasan, kerusakan sendi-sendi demokrasi tersebut terjadi akibat masifnya pencemaran nama baik, ujaran kebencian, hingga disinformasi. (Nothhaft, 2016: 65).

Selain kedua oposisi biner yang rigid di atas tidak sedikit pula cendekiawan yang lebih fleksibel dan tidak ingin terlalu dikotomis misalnya Timothy Garton Ash. Dalam bukunya *Free Speech: Ten Principle for a Connected the World* Ia menggunakan istilah *The Fallacy of Technological Determinism*. Istilah ini berupaya menjelaskan bahwa teknologi tidak secara *an sich* berkarakter tertentu namun netral—campur tangan manusia sebagai makhluk dinamis yang mengarahkannya pada titik tertentu.

Dalam nuansa yang tidak jauh berbeda, Merlyna Lim melalui *Many Clicks but Little Clicks: Social Media Activism in Indonesia (20103)* menjelaskan bahwa pandangan dikotomis dan parsial di atas cenderung menyederhanakan kompleksitas dinamika maupun interaksi organik antara teknologi, struktur, dan hubungan sosial, politik, juga budaya. Menurutnya, studi-studi lanjutan terkait hal ini harus mampu melampaui oposisi biner tersebut. (Lim, 2013: 637).

Oleh karena itu, pertanyaan *general* di paragraf pertama sebaiknya tidak boleh dijawab hanya dengan melakukan analisis terhadap media sosial dari perspektif sistem (teknosentrisme) atau analisis data besar (*big data*) saja, namun juga analisis yang melibatkan aspek-aspek lain seperti ekonomi, sosial, dan budaya penggunaannya. Bahkan Merlyna Lim melalui *Alternative Imagination: Confronting and Challenging the Persistent Centrism in Social Media Society Research (2022)* mendorong pendekatan lain sebagai jalur alternatif dalam penelitian media sosial—yaitu dengan tidak melewatkan studi kesejarahan (*longue durée*) dan studi interdisipliner lain. “Imajinasi alternatif” menurut Lim dapat membantu peneliti

dalam mendapatkan pemahaman yang lebih dalam dan komprehensif mengenai hubungan teknologi dan masyarakat, khususnya mengenai media sosial.

Dalam konteks Indonesia, secara umum media sosial dalam awalnya kemunculannya banyak digunakan untuk hal-hal pribadi yang bersifat hiburan seperti untuk berkomunikasi dengan rekan maupun keluarga, mencari dan bertukar informasi (Gunawan & Ratmono, 2021: 98) bagi mereka yang memiliki peminatan atau hobi yang sama. Namun kini komunikasi dan pertukaran informasi dengan tema politik serta isu-isu publik semakin sering dibicarakan, yang mana hal ini baik langsung maupun tidak langsung mengundang partisipasi masyarakat yang lebih besar. Hal ini dapat dilihat dari kemunculan berbagai aktivitas dalam jaringan (selanjutnya disebut daring) di media sosial seperti pembuatan/penyebarluasan konten kampanye politik secara suka rela, pembuatan konten kritik kebijakan, hingga menggalang petisi digital. Media sosial kini menjadi tempat penting bagi masyarakat dalam mencari dan bertukar informasi maupun opini terkait politik saat ini (Katadata, 2021).

Dalam diskursus opini dan informasi, Robert Dahl melalui *On Democracy* (1998) menjelaskan bahwa opini dan informasi merupakan sesuatu yang niscaya dalam demokrasi. Opini masyarakat dalam sistem demokrasi sangat penting, tentu dengan tidak mengabaikan bagaimana proses opini itu terbentuk—baik mengenai pengetahuan/pendidikan maupun validitas informasi yang menjadi basis opini tersebut (Dahl, 1998: 79). Konstruksi argumen Dahl ini dapat menjadi perbandingan sekaligus jalan bagi penelitian ini maupun penelitian-penelitian lain

sejenis tentang bagaimana demokrasi seharusnya beroperasi, terlebih di era perkembangan teknologi informasi yang pesat ini.

Sementara itu di sisi yang lain realitas memperlihatkan bahwa media sosial sebagai saluran penting bagi masyarakat dalam mencari serta bertukar informasi maupun opini mulai terdisrupsi oleh maraknya disinformasi. Berbagai peristiwa khususnya dalam proses-proses demokrasi elektoral Indonesia memperlihatkan bahwa informasi di media sosial kerap menjadi alat (Tapsell, 2018)—secara sengaja difabrikasi menjadi informasi yang tidak benar atau disinformasi politik dengan berbagai tujuan.

Secara teoretis disinformasi merupakan suatu informasi salah yang dengan sengaja diciptakan dengan tujuan menipu dan merusak (Guess & Lyon, 2020: 28). Disinformasi politik merupakan salah satu disrupsi (gangguan) yang patut diperhitungkan dampaknya serta dinamikanya. Disinformasi ini merusak ekosistem pembicaraan di ruang-ruang digital (media sosial). Guess & Lyon melihat bahwa disinformasi politik ini cenderung terjadi dan memiliki pengaruh yang lebih besar khususnya dalam demokrasi elektoral, hal tersebut mereka refleksikan dalam diskusi lengkap momen Pemilu Presiden Amerika Serikat Tahun 2016 dalam *Misinformation, Disinformation, and Online Propaganda (2020)*. Hal yang sama juga diungkapkan oleh Jaview Guallar et al bahwa disinformasi politik dirancang dan digunakan secara umum untuk mempengaruhi proses-proses dalam Pemilihan Umum (Guallar, 2020: 5).

Dalam konteks Indonesia terdapat beberapa diskusi terkait hal ini, salah satunya oleh Muninggar Saraswati dalam tulisannya *The Political Campaign Industry and The Rise of Disinformation in Indonesia (2020)*. Saraswati menjelaskan bahwa momen Pemilihan Umum Kepala Daerah DKI Jakarta Tahun 2012 merupakan pintu awal kemunculan industri *buzzer* dan maraknya disinformasi politik di Indonesia. Peristiwa ini untuk pertama kalinya menyajikan pertarungan wacana yang sebagian besar tidak substansial. Masalah-masalah tersebut terus ada dan mengalami perkembangan antar pemilihan umum dalam berbagai bentuk dan variasi. Disinformasi politik dengan basis isu SARA mampu disajikan dengan sangat meyakinkan, sehingga sulit bagi masyarakat awam bagaimana membedakan informasi yang benar dan mana yang salah (Saraswati, 2020: 54).

Masalah tersebut terus berlanjut ke berbagai pemilihan umum setelahnya seperti Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014, Pemilihan Umum Kepala Daerah DKI Tahun 2017, hingga Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019. Bahkan ketika pesta demokrasi ini telah selesai, industri *buzzer*, *troll*, maupun *influencer* politik terus ada—bergeliat sesuai dengan kebutuhan politik yang ada.

Disinformasi politik khususnya berbasis SARA ini tidak hanya meninggalkan pembelahan (polarisasi) yang melebar di antara masyarakat namun juga kultur digital yang buruk: dikotomi *cebong*, *kampret*, maupun *kadrun* yang terus digunakan dalam mengidentifikasi suatu kelompok hingga saat ini. Disinformasi ini membuat realitas yang ada menjadi kabur sehingga masyarakat dapat dengan mudah dituntun secara tidak sadar pada penerimaan cara-cara maupun

penggunaan teknologi yang salah—yang secara otomatis berimplikasi pada pelemahan hak-hak asasi warga negara (Balabanian, 1980:17).

Tidak hanya berkisar pada wacana politik yang memecah-belah di media sosial namun juga dapat merembet ke kehidupan nyata seperti pelaziman pelibatan kekerasan. Beberapa contoh misalnya kasus pembakaran Klenteng tahun 2016 di Tanjung Balai Sumatera Utara yang merupakan akibat dari disinformasi SARA dan bahkan yang terbaru kasus pemukulan Ade Armando pada aksi demo mahasiswa 11 April 2022. Kejadian ini merupakan akibat dari serangkaian aktivitas digital Ade yang dianggap kerap menyebarkan disinformasi politik berbasis SARA.

Disinformasi politik yang marak terjadi saat ini diperjelas bukti eksistensinya, salah satunya oleh laporan lembaga kajian demokrasi dunia Freedom House dengan tajuk *Democracy under Siege* (2021). Laporan ini menampilkan data yang memperlihatkan adanya penurunan dalam skor demokrasi dan indeks kebebasan internet di Indonesia (Repucci, 2021: 1). Kritikan tersebut terbagi atas dua hal: *Pertama*, meski tidak langsung berhubungan dengan konteks ini, pemerintah melalui Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) kerap memenjarakan lawan politik ataupun pihak-pihak yang dianggap bertentangan dan justru melindungi kelompok-kelompok jelas-jelas memproduksi disinformasi.

*Kedua*, pada tingkatan yang lain masyarakat juga dinilai ikut andil dalam menumbuh-kembangkan misinformasi dan disinformasi yang ada di ruang-ruang digital. Hal ini tersambung dengan apa yang diungkapkan Jullian McDougall bahwa

penyebaran disinformasi di ruang digital menjadi semakin cepat sebagai agregat dari lemahnya literasi digital dan rendahnya rata-rata pendidikan masyarakat secara umum (McDougall, 2019: 203).

Dalam konteks Indonesia, Agus Sudibyo melalui buku *Jagat Digital: Pembebasan dan Penguasaan* menjelaskan masyarakat Indonesia masih sulit untuk membedakan apakah media sosial itu media massa atau media alternatif? (Sudibyo, 2019: 363) atau yang mana disebut sebagai konten dan mana yang disebut berita. Sungguhpun demikian, terhadap penjabaran di atas bukan berarti tertutupnya hal ini dari kemungkinan lain bahwa elit, politisi, atau bahkan pemerintah sebagaimana penjelasan Mearsheimer dalam *Why Leaders Lie: The Truth about Lying in International Politics (2011)*, turut andil baik dalam pembuatan, penyebaran, maupun pembiaran disinformasi di ruang-ruang publik termasuk di media sosial.

Tidak berbeda dengan penelitian-penelitian lain, penelitian ini tentu berangkat dari adanya kesenjangan antara apa yang ideal secara teoretis dan apa yang menjadi kenyataan di tengah-tengah masyarakat. Secara teoretis demokrasi dalam pandangan ideal Habermas membutuhkan ruang publik (dalam hal ini ruang digital) dalam beberapa kriteria; apakah ruang itu inklusif; apakah bebas diakses oleh siapa saja; apakah pembicaraan di dalamnya ialah pembicaraan yang aktif; dan apakah pembicaraan tersebut merupakan sesuatu yang rasional? (Habermas, 1964:53).

Melalui ruang ini masyarakat dari berbagai kalangan maupun golongan dapat bertemu dan bertukar gagasan serta opini. Pembicaraan di ruang publik yang

diidealkan tersebut tidak dapat hanya terbatas pada isu-isu publik, namun juga kepekaannya dalam pengawasan terhadap pemerintahan. Kemunculan media sosial banyak disebut cendekiawan sebagai kemunculan kembali ruang publik (Habermas) model baru, karena mendekati ruang publik ideal yang digambarkan Habermas (Green, 2002: 120).

Berkebalikan dari itu, realitas memperlihatkan bahwa media sosial (khususnya Tiktok sebagai kajian utama penelitian) sebagai sumber penting bagi masyarakat dalam mencari dan bertukar informasi justru semakin terdisrupsi oleh disinformasi politik. Hal ini merusak proses-proses deliberasi di dalam masyarakat. Pembicaraan masyarakat semakin jauh dari substansi dan menjurus pada isu-isu sampingan.

Terdapat beberapa hal penting yang membuat perhatian terhadap media sosial ini menjadi semakin penting, yakni: *Pertama*, Tiktok merupakan satu-satunya media sosial yang secara statistik mengalami peningkatan jumlah pengguna baru secara eksponensial—lebih tinggi dari rata-rata media sosial lain (Kemp, 2022). Sehingga dengan angka pengguna yang tinggi dan jam penayangan video yang tertinggi membuat media sosial ini akan punya pengaruh tersendiri pada setiap momentum, tidak terkecuali pesta demokrasi yang akan segera datang.

*Kedua*, mengutip Nuuranti Jalli melalui risetnya dengan tajuk *TikTok: Consumption of Information among Gen-Z in Malaysia, Indonesia and the Philippines (2021)* menjelaskan bahwa tugas dalam mengungkap dan menelusuri disinformasi politik di Tiktok merupakan hal yang sangat sulit dan menantang—



kompleksitas yang ada merupakan kombinasi dari sistem, dinamika, bahasa, dan budaya domestik, hingga karakteristik penggunaannya. Oleh karena itu secara tidak langsung kehadiran studi-studi terkait hal ini merupakan suatu sumbangsih dalam memperkaya pemahaman terhadap masalah-masalah digital yang ada.

*Ketiga*, selain dapat terjadi kapanpun disinformasi politik cenderung meningkat menjelang tahun politik atau mendekati pemilihan umum seperti saat-saat sekarang ini (Guallar, 2020: 5). *For You Page* (selanjutnya disebut *FYP*) atau beranda Tiktok saat ini mulai diramaikan dengan disinformasi politik terkait bakal calon peserta Pemilihan Umum 2024, seiring penetapan bakal calon Presiden dan utak-atik konfigurasi koalisi partai politik peserta pemilihan umum. Penelitian ini tidak sentris calon atau individu tertentu secara rigid, namun mekanisme atau cara disinformasi di Tiktok beroperasi dengan melihat bakal calon yang ada. Sehingga, siapapun calon yang nantinya resmi ditetapkan oleh KPU sebagai peserta politik, analisis ini masih relevan dipakai dalam menganalisis masalah disinformasi politik di Tiktok.

*Keempat*, mayoritas pengguna Tiktok merupakan Generasi Z dan berdasarkan data Komisi Pemilihan Umum (KPU) generasi ini merupakan pemilih mayoritas Pemilihan Umum Tahun 2024. Sementara itu, tidak sedikit lembaga penelitian, salah satunya Indopol menyebutkan bahwa generasi ini cukup jauh atau tidak begitu meminati isu-isu politik. Hal ini secara otomatis membuat pemahaman serta pengetahuan generasi ini terhadap isu-isu politik menjadi tidak begitu baik. Oleh karena itu, memastikan kualitas informasi yang diproduksi dan bersirkulasi di media sosial ini tentu penting menjadi perhatian.

Perhatian terhadap hal secara umum juga disuarakan oleh beberapa pakar dan peneliti politik seperti pengamat dan peneliti Perludem Titi Anggraini yang menyorot tantangan besar disinformasi dan politik SARA atau politik identitas dalam demokrasi elektoral, maupun M. Qodari Indo Barometer yang mengkhawatirkan apakah Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024 dapat berlangsung sesuai dan dalam asas-asasnya atau tidak (Beritasatu, 2022).

Dalam *scope* yang lebih terfokus, penelitian ini berusaha menganalisis dan menjelaskan masalah yang ada melalui beberapa rumusan masalah, pertama yakni bagaimana mekanisme disinformasi politik di Tiktok; mengapa ini digunakan; isu apa yang kerap dibahas; serta bagaimana hal ini beroperasi. Rumusan masalah kedua berisi analisis risiko dan tantangan—dengan melihat karakteristik pola partisipasi politik digital lintas generasi (X, Y, Z) baik dari sisi motivasi maupun teknis penggunaan. Sementara yang rumusan masalah yang terakhir ialah agregasi kedua rumusan masalah di atas yang ditinjau melalui perspektif Teori Ruang Publik Jurgen Habermas dalam bingkai besar—apakah Tiktok mendorong karakteristik ruang publik ideal yang diajukan oleh Habermas?

Dalam mencapai tujuan tersebut penelitian ini akan menggunakan model penelitian kualitatif dengan pendekatan Etnografi Digital. Model ini cocok digunakan dalam usaha mendekati dan menyelami permasalahan terkait yang utamanya mengambil tempat di ruang digital Tiktok. Penelitian dalam pendekatan ini melalui proses pemetaan, pengamatan, analisis, penggambaran, dan peringkasan suatu fenomena yang terjadi di dalamnya. Usaha-usaha tersebut juga diperkuat

dengan wawancara secara langsung maupun ikut berpartisipasi dalam aktivitas kelompok-kelompok yang menjadi target penelitian. Tidak ketinggalan pula studi berbagai literatur, penelitian terdahulu guna mendapatkan analisis yang lebih lengkap.

Pemaknaan terhadap demokrasi tidak bisa direduksi dalam suatu perayaan yang sifatnya teknis-prosedural saja, namun lebih dari itu menyangkut nilai-nilai yang ada dan dipegang oleh masyarakat dalam menentukan sikap maupun pilihan. Sebagai catatan akhir untuk bagian pengantar ini, perlu dicermati bersama bahwa perhatian terhadap masalah-masalah digital semacam ini tidak boleh dibaca sebagai upaya menutup mata atau bahkan mendiskreditkan pencapaian baik media sosial yang telah ada. Sebaliknya, perhatian semacam ini justru merupakan suatu upaya untuk meminimalisir peluang buruk yang mungkin muncul dan mengupayakan peluang-peluang positif bagi perkembangan demokrasi Indonesia.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian di atas yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini ialah sebagai berikut:

1. Bagaimana mekanisme disinformasi politik di Tiktok dan tinjauannya sebagai ruang publik dalam perspektif Ruang Publik Habermas?
2. Bagaimana risiko dan tantangan disinformasi politik terhadap demokrasi elektoral?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Penelitian ini memiliki tujuan penelitian yang adalah sebagai berikut:

1. Untuk dapat memahami bagaimana disinformasi politik di Tiktok beroperasi dan meninjau Tiktok sebagai ruang publik digital masyarakat dalam perspektif Ruang Publik Habermas.
2. Untuk memahami risiko dan tantangan disinformasi terhadap demokrasi elektoral?

### **1.4 Manfaat Penelitian**

Penelitian ini tentu memunculkan beberapa manfaat yang dapat dirasakan secara langsung maupun tidak langsung, baik secara teoritis/akademis maupun praktis. Beberapa manfaat penelitian tersebut adalah sebagai berikut:

1. Manfaat secara akademis. Adanya suatu harapan agar penelitian ini mampu untuk ikut memberi kontribusi positif bagi pengembangan Studi Demokrasi dan Politik Digital, khususnya bagi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP), Universitas Diponegoro. Secara spesifik, adanya harapan agar studi mengenai disinformasi politik maupun ruang publik digital serta potensi risikonya menjadi semakin kaya dalam pembahasan permasalahan. Hal tersebut tentu pada gilirannya mampu mendorong lahirnya upaya-upaya konkrit yang mungkin ditempuh dalam memitigasi masalah digital ini.
2. Selain itu, secara praktis penelitian ini dapat ikut berkontribusi melalui sumbangan alternatif pemahaman bagi pemerintah dalam mengatasi

masalah-masalah digital untuk mewujudkan ruang digital dan partisipasi politik yang baik dalam nuansa demokrasi yang sehat.

Penelitian ini juga diharapkan mampu berkontribusi secara langsung, baik bagi masyarakat maupun peneliti. Bagi masyarakat, dengan adanya penelitian ini maupun penelitian serupa dapat menjadi pencerahan mengenai aktivitas di ruang-ruang digital; apa yang dapat dan tidak dapat dilakukan. Lebih lanjut juga bagaimana sebaiknya bersikap di ruang publik digital. Hal-hal tersebut tentu merupakan suatu upaya bersama dalam meminimalisir risiko negatif perkembangan teknologi.

## **1.5 Tinjauan Kepustakaan**

Dalam membangun suatu penelitian dibutuhkan suatu tinjauan kepustakaan/penelitian. Tujuannya ialah menghadirkan kebaruan dengan jalan menemukan *gap* yang nanti akan diisi sebagai bagian dari kontribusi penelitian guna memperkaya alternatif penyelesaian masalah. Di samping itu pembahasan dengan tema ini juga menjadi semakin luas dan baik.

### **1.5.1 Demokrasi Digital: Harapan dan Realitas**

Demokrasi digital tergolong bahasan baru di dalam Ilmu Politik, namun minat akademisi maupun ilmuwan terhadap hal ini cukup besar. Hal tersebut beriringan dengan harapan bahwa saluran digital (terkoneksinya komputer dengan internet) yang digunakan dapat memperluas dan meningkatkan nilai-nilai demokrasi. Hal ini diawali dari anggapan bahwa media ini dianggap mampu memberikan peluang bagi masyarakat untuk dapat turut serta dalam proses-proses

demokrasi karena hilangnya batas-batas yang dulu pernah ada melalui praktik-praktik demokrasi konvensional.

Jan Van Dijk melalui *Digital Democracy: Vision and Reality (2013)* menjadi salah satu tulisan kerap menjadi bahan utama dalam membahas demokrasi digital. Penjelasan yang komprehensif dilakukan dengan memetakan perkembangan awal demokrasi yang difasilitasi saluran digital (internet) yang dianggap revolusioner karena mampu mendemokratisasi politik dan masyarakat dalam skala yang lebih luas. Hal ini dimungkinkan karena sifatnya yang interaktif yang memungkinkan komunikasi dua sisi, masyarakat dapat secara aktif berkomunikasi mengenai suatu isu dan dilakukan secara langsung, kebebasan aksesnya, hingga memungkinkan kolaborasi yang lebih luas antar saluran. Mekanisme terhubung dan pertukaran informasi di antara pengguna saluran ini disebut Dijk sebagai *E-Participation*.

Kendati demikian, Dijk juga tidak memungkiri adanya peluang masalah. Untuk dapat secara aktif dan efektif terlibat dan mendapat pengaruh baik dari perkembangan teknologi ini setidaknya dibutuhkan beberapa kemampuan seperti kemampuan operasi komputer, kemampuan navigasi dan berselancar di internet, kemampuan mencari dan mengolah informasi di internet, hingga kemampuan mentransformasikan nilai-nilai yang didapat untuk partisipasi digital yang bermanfaat. Jika hal tersebut tidak terpenuhi, partisipasi yang diwadahi saluran digital tidak akan mampu memberdayakan masyarakat dan hal ini tidak ubahnya partisipasi model konvensional. Dampak lanjutannya hal ini akan menciptakan penghalang yang besar bagi perkembangan demokrasi.

### 1.5.2 Misinformasi dan Disinformasi

Tulisan Van Dijk di atas telah menjadi jembatan bagi prospek dan tantangan demokrasi digital, bahwa harapan juga perlu dijembatani oleh kemampuan masyarakat dalam memanfaatkan saluran digital. Pengolahan informasi menjadi penting, jika tidak informasi yang ada justru menjadi tidak tepat guna atau bahkan merusak ekosistem percakapan masyarakat di ruang digital. Kerusakan informasi dalam tren terbaru cukup bervariasi jika ditinjau dari segi motif, sehingga pengklasifikasiannya secara umum dapat menjadi misinformasi, disinformasi, dan malinformasi.

Andrew Guess dan Benjamin Lyons dalam tulisannya yang berjudul *Misinformasi, Disinformasi, dan Propaganda Online (2020)* secara teoretis menjelaskan apa itu misinformasi dan apa itu disinformasi. Dalam membuka pemaparan keduanya tidak memungkiri bahwa media sosial memang memiliki kontribusi positif terhadap demokrasi pada tahap awal perkembangannya. Ada harapan besar—didasarkan pada kemampuan maupun potensi media sosial dalam menghadirkan pemerataan partisipasi politik masyarakat, memperluas kesempatan ekonomi, memungkinkan aksi kolektif, serta memfasilitasi ekspresi model baru (Guess, 2020: 2).

Kendati demikian, Guess dan Lyons juga tidak pula menutup mata terhadap dinamika dan perkembangan yang terjadi akhir-akhir ini yakni kemunculan dampak negatif media sosial. Diskusi maupun forum ilmiah yang mengambil tema di sekitar dampak negatif media sosial semakin banyak dan mengemuka pula. Hal ini berangkat dari realitas bahwa media sosial utamanya Facebook dan Twitter menjadi

inkubator dari berita bohong dan propaganda untuk melakukan suatu perubahan sosial.

Mereka juga mencemaskan penyebaran misinformasi dan disinformasi yang semakin cepat khususnya di negara-negara berkembang melalui perangkat telepon pintar, yang pada gilirannya mampu menciptakan pembelahan sosial dan berpotensi melibatkan kekerasan (Guess, 2020: 27). Guess dan Lyon mendefinisikan disinformasi sebagai suatu upaya yang dengan sengaja menyebarkan informasi salah. Tujuannya untuk merusak ekosistem suatu percakapan dan bahkan mendistorsi kebenaran yang ada. Pandangan tersebut didasarkan pada analisis yang mereka lakukan, salah satunya melalui peristiwa kampanye Pemilihan Presiden Amerika Serikat Tahun 2016 yang riuh dan penuh dengan disinformasi politik.

Secara struktur penelitian ini dibangun dengan tiga kerangka utama untuk memahami bagaimana misinformasi, disinformasi, dan propaganda daring terjadi, yakni: bagaimana itu diproduksi, dikonsumsi, dan disebarkan. Aspek ini sekilas memang terlihat sama dengan apa yang peneliti gunakan, namun tentu terdapat perbedaan karena selain berusaha menjelaskan bagaimana disinformasi politik produksi, konsumsi, dan distribusi, peneliti juga melakukan upaya penelaahan pada aspek hukum dan bagaimana ini berpengaruh.

### **1.5.3 Kampanye Politik dan Kemunculan Disinformasi**

Muninggar Saraswati melalui *Industri Kampanye Politik dan Kemunculan Disinformasi di Indonesia (2020)* berupaya menjelaskan disinformasi yang terjadi di Indonesia—mulai dari kelahiran, awal perkembangan, hingga titik kritis dari perjalanannya. Hal ini tentu sangat berdampak pada penelitian ini, mengingat



adanya kesamaan cara pandang, aspek sosiologis, politis, dan aspek demografi. Tulisan ini memfokuskan pembahasannya pada pemilihan umum dan industri *buzzer*. Memiliki alur berfikir yang sekilas terlihat serupa, tulisan ini juga melihat bahwa bahwa disinformasi yang disebarkan oleh *buzzer*, tidak hilang begitu pemilihan umum usai—namun mereplikasi diri dan berkembang menjadi suatu industri yang siap dikerahkan untuk isu politik atau momen tertentu di luar pemilihan umum.

Terdapat pula kekhawatiran potensi terkikis atau bahkan kerusakan demokrasi di Indonesia. Hal ini didorong oleh adanya suatu upaya hegemoni ala Gramsci oleh pemerintah. Dalam bahasa yang lugas, Dia menjelaskan bahwa pemerintah membutuhkan persetujuan dari akar rumput atau masyarakat, sehingga perlu dikerahkan suatu “pasukan *buzzer*” untuk menyeragamkan opini demi mempertahankan kekuasaannya.

Mengutip Vedi Hadiz, demokrasi pasca otoritarian, uang dan kekerasan politik bukan satu-satunya mekanisme untuk mempertahankan kekuasaan para elit, namun dibutuhkan persetujuan rakyat baik berupa opini maupun legitimasi yang didapat melalui pemilihan umum (Hadiz, 2010:95). Oleh karena itu, Saraswati melihat disinformasi sangat erat berkaitan dan vital bagi demokrasi dalam konteks pemilihan umum.

Berbeda dengan penelitian ini, meski sama-sama melihat disinformasi politik sebagai ancaman terhadap demokrasi, penelitian ini lebih memfokuskan diri pada ancaman demokrasi yang berpangkal pada buruknya diskursus masyarakat akibat semburan informasi SARA dan signifikansinya. Hal itu dicapai dengan tidak

mengabaikan demografi, dinamika, maupun perubahan paradigma di dalam masyarakat sebagai penerima informasi. Hal ini tentu membuat disinformasi politik yang terjadi saat ini berbeda dengan yang terjadi pada masa-masa sebelumnya.

Distorsi kebenaran melalui disinformasi tentu akan teramplifikasi daya rusaknya jika mampu menyentuh rasa dasar *sense of belonging* manusia semisal masalah-masalah kesukuan, keagamaan, ras, dan antargolongan. Berbagai peristiwa telah terjadi yang melibatkan disinformasi politik dengan basis isu SARA, salah satunya peristiwa pembakaran klenteng dan wihara di Tanjung Balai pada tahun 2016. Temuan Ubaidillah dan Hartanto dalam *Disinformasi Keagamaan di Indonesia: Suatu Tinjauan Wacana (2020)* bahwa disinformasi keagamaan utamanya yang terjadi di Indonesia memainkan daya persuasi yang sangat tinggi karena mempunyai fondasi kesejarahan—kekerasan, pembunuhan, serta realitas ketidakseimbangan akses terhadap ekonomi dan politik.

Jurnal Ubaidillah dan Hartanto di atas berupaya menjelaskan bagaimana disinformasi khususnya yang bertema komunisme Negara Tiongkok dan etnis Tionghoa dalam terminologinya yang berkelindan dengan sentimen kesukuan dan keagamaan khususnya agama Islam dalam narasi kesejarahan. Disinformasi sentimen yang berbalut SARA ini menurut mereka tidaklah berada dalam ruang vakum namun—Ia berkembang seiring waktu dan memiliki jalinan antagonisme dengan narasi yang telah berkembang sebelum-sebelumnya. Dalam urusan politik, isu kesukuaan mencuat utamanya menjelang pemilihan umum.

Keambiguan terminologi Tiongkok-Tionghoa peranakan yang ada dimanfaatkan segelintir orang untuk kepentingan politik jangka pendek, semisal

pada Pemilihan Umum Kepala Daerah DKI Jakarta Tahun 2017. Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok kerap dinarasikan sebagai agen Partai Komunis Indonesia (PKI) karena tautan kesukuan yang mengarah pada negara Tiongkok yang berideologi komunisme. Disinformasi politik SARA ini dibangun melalui berbagai media semisal utas-utas teori konspirasi di Twitter maupun foto-foto editan yang tersebar di berbagai platform media sosial.

Selain Ahok, Joko Widodo juga kerap dituding dalam narasi disinformasi SARA dalam sentimen yang sama karena menyembunyikan asal-usul keluarganya yang bertenis Tionghoa sebagai siasat agar mulus maju menuju kursi kepresidenan. Tujuan akhir dalam narasi tersebut ialah mengubah Indonesia menjadi negara komunis yang anti Islam.

Disinformasi politik SARA ini merusak demokrasi dengan jalan meramaikan ruang-ruang publik digital dengan keriuhan yang tidak berarti. Pembicaraan publik terkait ini hanya berkisar pada isu-isu murahan dan jauh dari isu-isu fundamental seperti apakah visi-misi calon-calon yang ada mampu merefleksikan keresahan masyarakat menyangkut ekonomi, sosial, politik, hukum dan supremasi hukum atau tidak. Nuansa kritis Ubaidillah dan Hartanto di atas kurang lebih satu nafas dengan penelitian ini namun mengambil lintasan ideologi yang berbeda. Selain memeriksa anatomi disinformasi politik SARA secara teoretis dan empiris, penelitian ini juga tidak mengabaikan masyarakat dalam dinamikanya sebagai penerima informasi meski faktor kesejarahan juga ikut mempengaruhi suatu isu.

#### 1.5.4 Disrupsi, Disinformasi, dan Ruang Publik Digital

Nadia Alonso-López dkk dalam jurnal *Melampaui 'Tantangan' dan Gerakan Tarian Viral: TikTok sebagai sarana untuk Disinformasi dan Pengecekan Fakta di Spanyol, Portugal, Brasil, dan Amerika Serikat (2021)* menguraikan betapa media sosial Tiktok tidak dapat hanya dipandang sebagai media sosial yang sarat hiburan semata, namun lebih dari pada itu Tiktok merupakan media yang menjadi pusat informasi khususnya ketika pandemi melanda. Perhatian terhadap media ini semakin meningkat seiring banyaknya hasil analisis dan temuan yang memperlihatkan bahwa Tiktok secara sistem memungkinkan suburnya disinformasi politik. Hal ini menjadi semakin kompleks mengingat tidak terbukanya Bytedance terhadap *data mining* dan penjelasan bagaimana algoritmenya beroperasi.

Secara umum riset ini dibangun dengan tujuan melihat kembali bagaimana disinformasi politik disebarluaskan di Tiktok dan berpengaruh terhadap opini masyarakat di empat negara. Lopez dkk memulai analisisnya dalam membatasi definisi disinformasi politik yang mereka gunakan—merujuk pada Javier Guallar disinformasi merupakan fenomena bersegi banyak dengan aspek maupun motif yang berbeda-beda, yang pada dasarnya berupa penyamaran terhadap identitas tertentu (*spoofing*) dan berusaha menyebabkan kerusakan utamanya proses-proses demokrasi elektoral. Peristiwa seperti kampanye Pemilihan Umum Presiden Amerika Serikat Tahun 2016, British Exit (Brexit), dan naiknya Jair Bolsonaro ke kursi Kepresiden Brasil juga tidak luput dari kajian ini.

Hasil penelitian memperlihatkan terdapat pola—dari empat negara yang disurvei penyebaran disinformasi politik umumnya menggunakan profil atau akun

palsu (*fake account*). Bentuk umum disinformasi politik di Tiktok secara naratif dibangun oleh pengguna individu yang menyisipkan *video* atau foto dari platform digital lain dengan konteks berbeda, hal ini selanjutnya diperkuat dengan bubuhan tek-teks yang salah dan cenderung bias. Namun yang membedakannya isu atau tema disinformasi di setiap negara memiliki karakteristik masing-masing.

Temuan di Spanyol memperlihatkan isu yang terus menjadi perbincangan umum ialah polarisasi politik. Sebagian besar wacana merujuk pada isu-isu mengenai ketidakmampuan pemerintah, perwakilan politik, dan partai politik yang ada dalam mengurus urusan ekonomi dan kesehatan, secara spesifik terkait Covid-19. Terdapat temuan menarik lain di Portugal, adanya fenomena yang mereka sebut sebagai kebohongan yang dalam (*Deepfake*). Istilah ini mengacu pada kebohongan yang dibangun dengan sangat canggih—melibatkan teknologi, di mana wajah seseorang diganti (dalam hal ini wajah Presiden). Selanjutnya *video* dengan wajah yang telah dimanipulasi tersebut mengucapkan kata-kata atau kalimat yang tidak benar, tidak pernah terjadi, atau disinformasi politik lainnya. Tidak sedikit yang mempercayai hal tersebut, hal ini diakibatkan kurangnya informasi dan lemahnya literasi digital pengguna.

Berbeda dengan kasus Portugal, Amerika Serikat dan Brasil cenderung dikerap diterpa isu-isu yang campur aduk antara isu jaminan kesehatan/vaksin Covid-19, teori konspirasi, dan isu superioritas ras khusus pada Amerika Serikat. Ada anggapan bahwa orang-orang dengan ras tertentu mengatur berbagai macam agenda politik Amerika Serikat, oleh karena itu dibutuhkan suatu perubahan besar untuk mengubah wajah perpolitikan negara tersebut. Analisis terkait sistem,

mayoritas dari responden memperlihatkan beranda yang berbeda-beda, hal ini memperlihatkan bahwa algoritme Tiktok sangat dipersonalisasi dan konten disinformasi politik yang disajikan cenderung dibalut dengan nuansa humor yang insinuatif. Terdapat pula kecenderungan memanjakan atau mengkonfirmasi bias yang berlebihan yang membuat pengguna semakin tenggelam terhadap suatu informasi.

Penelitian ini meski mengambil tempat di luar Indonesia tentu dapat menjadi gambaran bagaimana aplikasi Tiktok secara sistem terkait dengan disinformasi politik utamanya dalam isu pemilihan. Meski temuan awal penelitian ini belum memperlihatkan kerentanan yang ditunjukkan oleh temuan penelitian di atas (*deepfake*), tentu dibutuhkan perhatian lebih mengingat nuansa pemilihan umum mulai terasa dan menarik perhatian netizen di Tiktok Indonesia.

Analisis suburnya disinformasi politik oleh dukungan sistem oleh penelitian di atas agaknya perlu dipertemukan dengan analisis di luar sistem yakni terkait analisis fenomena karakteristik penggunanya. Misalnya temuan Ni Made Ras Amanda melalui penelitiannya *Disrupsi Politik dan Ruang Publik Digital (2021)* yang secara khusus memiliki fokus bagaimana media sosial sebagai ruang publik digital terkait dengan disrupsi politik berupa disinformasi oleh *Buzzer*. Amanda memulai dengan penjelasan disrupsi politik media sosial yang diakibatkan oleh bertaburnya pertarungan wacana politik yang merusak dan gaduh.

Selain menjelaskan disrupsi teknologi mampu mengubah tatanan politik baik dari segi praktik dan biaya politik yang mahal menjadi lebih praktis dan murah, terdapat tantangan baru yang tidak kalah penting—industri baru *buzzer* dan

*influencer* politik juga menjadi tantangan baru tersendiri. Mengapa demikian, hal tersebut diakibatkan oleh ramainya dan riuhnya ruang-ruang publik digital oleh perang wacana, tagar, yang memiliki agenda untuk mengaburkan wacana asli melalui fabrikasi wacana lain yang jauh dari substansi utama.

Terlihat adanya kesamaan aspek yakni pada pembahasan ruang publik digital, disrupsi, dan media sosial. Namun, tulisan di atas berusaha menggarisbawahi disrupsi teknologi yang kemudian berimbas pada disrupsi politik. Berbeda dengan fokus penelitian Amanda, penelitian ini secara khusus memberikan fokusnya pada disinformasi politik yang mendisrupsi ruang publik digital masyarakat yaitu Tiktok, yang kemudian mengakibatkan rusak dan menjauhnya ruang publik digital yang digambarkan secara ideal oleh Habermas.

## **1.6 Kerangka Pemikiran**

Dalam usaha menjawab pertanyaan penelitian ini, dibutuhkan kerangka pemikiran yang menjadi konstruksi penelitian agar menjadi kuat dan terarah. Kerangka penelitian tersebut ialah sebagai berikut:

### **1.6.1 Demokrasi Digital**

Demokrasi terus mengalami perkembangan dalam bentuk maupun bahasan keilmuannya. Salah satu varian dari perkembangan tersebut ialah demokrasi digital. Pembahasan mengenai hal ini semakin diminati oleh banyak pakar karena dianggap sangat relevan di era perkembangan teknologi. Ia dianggap sebagai suatu konsep yang nantinya menjadi “jalan raya” bagi berbagai macam pengetahuan maupun fenomena demokrasi/politik pada masa mendatang.

Demokrasi digital merupakan kumpulan dari berbagai interaksi masyarakat dengan pemerintah/aktor politik dalam jaringan digital. Lebih lanjut, demokrasi digital ini juga mencakup aktivitas-aktivitas berupa partisipasi yang berkenaan dengan pengawasan kebijakan pemerintah, penyampaian maupun pertukaran ide, gagasan, pemberian masukan melalui pembuatan konten digital atau dalam perspektif elektoral dapat berupa pemberian suara pada pemilihan umum. Dalam definisi yang lain, demokrasi digital merupakan kumpulan praktik-praktik demokrasi yang tidak terbatas ruang dan waktu maupun kondisi fisik. Praktik ini dijalankan dan dimediasi oleh penggunaan teknologi informasi dan komunikasi (ICT) serta komunikasi berbasis komputer (CMC) (Hacker & Djik, 2000:1).

Merupakan simbiosis antara demokrasi, masyarakat, dan perkembangan teknologi, konsep ini menjadi sangat menarik dibanding dengan pendahulunya yang konvensional. Konsep ini memungkinkan model komunikasi interaktif; dua arah, antara masyarakat dengan pemerintah, secara langsung. Hal ini merupakan sesuatu yang tidak bisa dicapai pada masa-masa sebelumnya. Pada saat yang sama, daya tawar masyarakat menjadi lebih besar akibat tersedianya saluran-saluran atau *platform* digital, salah satunya di media sosial.

Benar bahwa demokrasi merupakan “pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat”, seperti yang pernah diucapkan oleh Abraham Lincoln melalui pidatonya di Gettysburg, Pennsylvania Tahun 1863 “...and that government of the people, by the people, for the people, shall not perish from the earth”, namun dalam perspektif terbaru di era modern dan digital, agaknya definisi tersebut harus dikembangkan dan dilakukan pencocokan. Selain demokrasi dibangun oleh dan



untuk rakyat, demokrasi juga ditentukan oleh bagaimana kebebasan opini publik (Manin, 1997:170) dan juga Robert Dahl menambahkan mengenai bagaimana opini yang beragam mampu terbentuk secara bebas melalui dialog, musyawarah, dengan tidak melupakan bahwa opini tersebut juga harus bersandar pada sumber dari informasi baik yang dapat diandalkan/dipercaya (Dahl, 1998:79).

Dahl juga menyadari terdapat peluang terjadinya kesalahan yang diciptakan oleh masyarakat sendiri akibat beberapa hal, maka dari itu Dahl dan beberapa para pendukungnya sepakat untuk menempatkan pendidikan, baik pendidikan formal maupun pendidikan kewarganegaraan sebagai sesuatu yang penting dalam demokrasi di era modern dan teknologi seperti saat ini (Dahl, 1998:185).

Lebih lanjut dalam konteks demokrasi Indonesia, pembicaraan mengenai pencapaian gemilang demokrasi Indonesia pasca jatuhnya Presiden Soeharto kini mulai samar terdengar, sebaliknya pembicaraan mengenai penurunan prestasi demokrasi yang bahkan mengarah pada kemunduran justru menjadi semakin nyaring. Berbagai lembaga riset baik dalam maupun luar negeri seperti Freedom House, V-Dem, maupun The Habibie Center, maupun LIPI sepakat pada suatu kesimpulan: telah terjadi kemunduran pada demokrasi Indonesia. Beberapa hal seperti perkembangan intoleransi, menguatnya sektarianisme (Mietzner et al, 2018: 159), menurunnya kebebasan sipil (Marta et al, 2019: 255), maupun penumpukan kekuasaan eksekutif untuk membungkam oposisi bahkan dengan jalan yang otoriter (Power, 2018: 307) ditengarai menjadi pemicu utama.

Berbeda dengan yang terjadi di masa-masa yang lalu, kemunduran ini secara nyata mengambil latar belakang dan sebagian besar terjadi di media sosial. Media

sosial menjadi sarana utama masyarakat dalam mencari dan bertukar informasi (Katadata, 2021) termasuk urusan politik. Walaupun bukan sebagai sumber tunggal namun pengaruh yang dibawa cukup besar. Penggunaan media sosial mempercepat penyebaran sebuah gagasan tanpa *filter*, secara eksponensial—hanya dalam hitungan menit suatu berita sudah berada di genggamannya masyarakat dan siap untuk direspon.

Tidak jarang media sosial juga membentuk kelompok-kelompok fanatis yang cenderung ekstrim, sebagai akibat dari terbentuknya *Echo chamber*; suatu ruang gema berisi orang-orang yang memiliki minat dan ketertarikan yang sama mengenai suatu informasi dan mereka mengisolasi diri dari sudut pandang yang mereka tidak setuju (Vaccari, 2016: 2) atau dalam istilah lain *Filter bubble*—masyarakat digital hidup dalam gelembung-gelembung informasi tanpa tahu/mau tahu apa yang terjadi di luar gelembung tersebut (Pariser, 2011:11). Fenomena ini dengan perlahan namun pasti membentuk polarisasi.

Polarisasi yang semakin nyata ini merupakan manifestasi dari menguatnya isu-isu SARA dan sektarianisme yang tidak jarang dibangun melalui wacana-wacana intoleran, yang mana hal tersebut merupakan hasil dari paparan misinformasi atau bahkan disinformasi politik berbasis SARA. Senada dengan penjelasan akademisi Universitas Gajah Mada Wisnu Prasetya Utomo melalui petikan wawancara berikut:

“Disinformasi memang masih terus ada dan isunya masih seputar politik identitas atau SARA. Ini merupakan isu lanjutan kontestasi Pemilihan

Umum 2019. Walaupun rekonsiliasi telah terjadi di atas, tapi di bawah masih terpolarisasi.” (Wawancara dengan narasumber, 2 November 2022).

Tidak bisa dianggap sebagai angin lalu, fenomena ini dengan pelan dan pasti merusak kehangatan perbincangan antar sesama warga negara dan demokrasi secara umum. Carothers dan O’Donohue dalam studinya menemukan bahwa polarisasi ini merusak demokrasi dengan jalan secara rutin melemahkan penghormatan terhadap norma-norma demokrasi (Carothers & O’Donohue, 2019:2).

Perkembangan zaman, teknologi, dan demokrasi itu sendiri tentu membuat masalah-masalah yang mungkin muncul tentu mengalami perkembangan pula, baik cara maupun daya pengaruhnya. Disrupsi disinformasi politik khususnya berbasis SARA sangat berbahaya, karena mengganggu sentimen dengan jalan mengaduk perasaan masyarakat, terlebih dijalankan dalam jalan yang mutakhir di tengah realitas kesenjangan pesatnya perkembangan teknologi dan tingkat literasi digital maupun rata-rata pendidikan masyarakat secara umum. Oleh karena itu tentu permasalahan-permasalahan digital semacam ini tentu membutuhkan analisis dan solusi yang mutakhir pula.

### **1.6.2 Disrupsi: Disinformasi Politik**

Daniel Bell dalam *The Coming of The Post-Industrial Society* menjelaskan bahwa hal yang signifikan dalam masyarakat pasca industri bukan lagi tenaga otot atau energi, tapi informasi dan pengetahuan—Ia merupakan sentral dari perkembangan itu (Bell, 1976: 576), khususnya di era teknologi yang sedang berkembang pesat ini. Perkembangan teknologi dalam penyebarannya yang masif

tidak terhenti pada negara-negara tertentu, namun secara keseluruhan termasuk negara-negara miskin dan berkembang.

Negara-negara Skandinavia umumnya menikmati nilai baik dari perkembangan teknologi informasi karena telah siap dalam hal sumber daya manusia, sarana, dan prasarana sebelumnya. Selain negara-negara Skandinavia, perlombaan dalam merangkul 40 melalui perkembangan teknologi ini menjadi beragam antar negara, ada yang secara baik dan berhasil, namun tidak sedikit mengalami nasib yang sebaliknya.

Tidak ingin dibaca dalam nuansa yang sarat penyangkalan, selain perkembangan teknologi ini menghadirkan efek positif seperti yang dijelaskan Diamond (*Internet is Liberation Technology*) (walaupun kemudian Ia memperbaiki argumennya), tentu saja efek negatif selalu mengikuti. Efek negatif tersebut tentu harus mendapatkan perhatian secara khusus. Efek samping perkembangan teknologi yang ditunjukkan akhir-akhir ini memperlihatkan gejala yang tidak sehat, bahkan berpotensi merusak demokrasi dengan jalan mendisrupsi ruang publik digital melalui disinformasi.

Gunawan dan Ratmono melalui *Demokrasi di Era Post-Truth (2021)* menjelaskan bahwa terdapat beberapa tipe disinformasi. *Pertama*, disinformasi politik. Disinformasi politik ialah penyebaran informasi yang salah dengan sengaja dalam agenda atau dengan motivasi politik tertentu. Hal ini diupayakan umumnya untuk merusak citra lawan politik maupun mendeligitimasi proses-proses pemilihan umum. *Kedua*, disinformasi non politik. Disinformasi ini tentu tidak berkaitan

dengan politik namun penyebarannya tentu saja didasri kepalsuan dan distorsi informasi di ruang publik digital, contoh seperti disinformasi korban berjatuh karena Virus Covid 19 atau penggunaan vaksin yang menyebabkan kematian.

*Ketiga*, disinformasi dengan tujuan hiburan. Disinformasi ini biasanya disajikan dengan humor maupun parodi. Namun tidak jarang model ini mampu digiring ke arah politik karena memiliki elastisitas yang berbeda. Motivasinya tentu beragam namun secara umum hanya dilandasi kesenangan dan rasa ingin mendapatkan perhatian dari masyarakat. *Keempat*, disinformasi yang bersifat komersial. Disinformasi dengan model ini berorientasi pada motif ekonomi atau pencarian keuntungan finansial.

Disrupsi secara bahasa dapat dipahami sebagai gangguan. Gangguan tersebut ialah disinformasi politik terlebih dibalut dengan isu SARA: informasi yang sengaja dirancang untuk merusak, menipu, dan membuat kekacauan dengan basis suku, ras, agama, dan antargolongan. Disrupsi dalam konteks ini merupakan gangguan terhadap kenormalan ruang publik digital, dimana seharusnya ruang publik digital diisi oleh banyaknya percakapan warga negara maupun debat yang rasional, tidak terbatas, tidak dapat diintervensi, dan juga beradab. Disinformasi politik SARA ini dapat tercipta pemerintahan berkuasa, elit, atau oleh masyarakat biasa. Ketiganya memiliki implikasi yang berbeda—bergantung pada momentum, konteks, arah angin politik, serta instrumen yang digunakan.

Secara umum misinformasi dan disinformasi adalah dua hal yang berbeda namun sering disamakan. Andrew Guess dan Benjamin Lyons menjelaskan bahwa

kedua hal tersebut memang merupakan pesan menyesatkan yang tersebar di bawah kedok konten tertentu, baik dalam bentuk komunikasi elit, pesan daring, periklanan, maupun publikasi artikel (Guess, 2020:10).

Melengkapi definisi tersebut, misinformasi dapat terjadi dan menyebar akibat beberapa hal seperti ketidaksengajaan, ketidaktahuan, pengutipan yang sembrono, dan analisis yang keliru. Mereka menambahkan, secara umum misinformasi tersebut merupakan suatu pengajuan klaim yang bertentangan dan mendistorsi pemahaman umum tentang fakta yang dapat diverifikasi (Flynn, et al, 2017:127).

Di sisi lain, disinformasi jelas memiliki intensitas atau niat yang jelas, yaitu menyebarkan informasi yang salah dengan maksud menipu (Tucker, 2018:3) dan dilakukan atas motif tertentu. Baik misinformasi maupun disinformasi dapat terjadi dengan atau tidak dalam prinsip anonimitas digital. Keduanya (misinformasi dan disinformasi) berpotensi merusak ekosistem perbincangan masyarakat utamanya terkait politik. Anonimitas digital patut diperhitungkan. Dalam definisinya anonimitas digital merupakan suatu prinsip yang memungkinkan *user*/pengguna suatu platform dapat dengan leluasa berselancar di dunia maya tanpa identitas yang konkrit atau asli. Dalam definisi yang lebih sederhana hal ini merupakan keadaan di dunia digital dimana orang menjadi tanpa identitas dan tidak diketahui (Pavliček, 2005:8).

Kaitannya dalam komunikasi ialah terdapat suatu perbedaan signifikan antara interaksi sehari-hari di dunia nyata dan dunia maya. Interaksi secara

langsung artinya interaksi yang membuat seorang pribadi menjadi lebih disiplin—menahan diri terhadap sesuatu yang mungkin dirasa tidak berkenan di hati dan tetap bersikap dalam norma-norma moral yang selama ini disepakati secara umum.

Berbeda dengan dunia maya, terlebih dalam prinsip anonimitas—hal ini membuat orang cenderung mengabaikan nilai-nilai moral dan etika yang selama ini dipegang dalam kaitannya dengan gaya interaksi sehari-hari. Khususnya dalam politik, model interaksi seperti ini sangat berbahaya karena mendorong orang untuk dengan melakukan kebohongan, melampiasakan perasaan secara tidak terkontrol, bertindak tanpa batas, mengucapkan ujaran kebencian, membunuh karakter seseorang, hingga penyebaran misinformasi dan disinformasi.

Di Indonesia secara khusus, perkembangan pemanfaatan anonimitas cukup dinamis, hal ini dapat ditelusuri awal kemunculan dan perkembangannya melalui potongan wawancara dengan akademisi Universitas Diponegoro Dr. Nurul Hasfi, berikut ini.

“Prinsip anonimitas atau orang bukan dengan identitas ini sebenarnya dulu sangat penting dan kerap digunakan, utamanya di dalam urusan hukum dan HAM. Samarnya identitas ini membuat seseorang terdorong mau dan leluasa untuk mengungkap kebenaran yang diketahui karena tidak adanya rasa khawatir akan mendapatkan tekanan dari pihak manapun karena informasi yang diberikan. Namun saat ini di era digital dan media sosial, instrumen ini kerap disalahgunakan oleh beberapa orang untuk menyebabkan berbagai masalah digital seperti penipuan, pemaksaan,

pencemaran nama baik, hingga menyebarkan disinformasi”. (wawancara tanggal 9 November 2022).

Disinformasi jika dilihat dari struktur terbawahnya memang bukan merupakan suatu fenomena yang baru dan unik pada negara atau bangsa tertentu, namun merupakan suatu fenomena global. Selain itu, Ia mengambil tempat tidak hanya di negara miskin atau berkembang, namun juga di beberapa negara maju. Perkembangan sistem informasi dan teknologi ternyata telah membawa disinformasi pada tingkat selanjutnya dan mempunyai implikasi yang tidak bisa dianggap remeh.

Untuk isu di dalam negeri, sejak Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019 ruang publik digital diramaikan dengan wacana calon (saat itu) dan Presiden terpilih Joko Widodo berada di bawah kendali “Sembilan Naga”, yang mana kelompok ini diisi oleh pengusaha-pengusaha keturunan etnis Tionghoa dan memiliki hubungan langsung dengan Pemerintah Tiongkok. Isu ini dibangun dengan keyakinan dasar bahwa terdapat persekongkolan besar pengusaha keturunan Tionghoa dengan pemerintahan berkuasa. Tujuannya ialah membangun ketidakpercayaan terhadap pemerintah dengan jalan memaikan sentimen masyarakat dalam basis ketimpangan ekonomi berbalut SARA (kontrol non pribumi terhadap pribumi) dan hubungan langsung dengan pemerintah berideologi komunisme—dimana di sisi kesejarahan komunisme melalui PKI merupakan musuh utama masyarakat secara umum (Peristiwa G30S PKI).



Hal ini kerap terjadi dan mendukung semakin besar akibat kebutuhan dan dinamika politik. Cass Sunstein menyebut hal ini sebagai suatu isu yang didasari keyakinan bahwa terdapat suatu kelompok kuat tersembunyi yang melakukan kontrol atas beberapa aspek masyarakat (Sunstein & Vermeule, 2009: 202). Disinformasi politik SARA lain misalnya, Presiden Jokowi kerap diasosiasikan dengan kerangka berfikir Taipan Tionghoa-Tiongkok (negara)-Komunis. Hal ini dibangun dengan narasi Jokowi merupakan keturunan anggota Partai Komunis Indonesia (PKI) yang kemudian pro aseng (Tiongkok) melalui isu-isu seperti mudahnya proyek strategis Indonesia dikerjakan oleh RRT hingga mudahnya masuk dan keluar pekerja dari RRT. Pekerjaan asosiasi-mengasosiasikan ini bukan pekerjaan satu malam, namun terus-menerus melalui semburan disinformasi media sosial.

Tidak hanya dalam kasus Jokowi, saat ini muncul ke permukaan isu khilafah. Isu ini secara umum dibangun dalam konstruksi berfikir bahwa syariat islam total nantinya akan menggantikan Panca Sila dan NKRI dan Indonesia menjadi negara kekhilafahan. Meski memiliki akar sejarah yang dapat ditelusuri, isu-isu ini baru berkembang dalam beberapa kurun tahun terakhir. Seakan menjadi isu yang “*head to head*” dengan isu PKI-komunisme, isu ini kerap disangkakan dengan kelompok tertentu, utamanya ketika Aksi 212 mencuat. Pihak-pihak yang terkait baik secara politik maupun teknis aksi kerap dilabeli pro khilafah dengan beberapa “pelintiran”. *Labeling Kadrun* atau kadal gurun yang mengarah ke etnis arab juga muncul dan sering dialamatkan pada kelompok ini. Suasana demikian

mengarah pada apa yang dijelaskan Power dan Warburton sebagai polarisasi afektif dan tentu hal tersebut tidak dapat dibiarkan terus menerus.

### **1.6.3 Ruang Publik Digital**

Konsekuensi nyata dari berfungsinya sistem demokrasi secara baik ialah adanya partisipasi politik masyarakat. Ramlan Surbakti mendefinisikan partisipasi politik sebagai suatu keikutsertaan warga negara dalam menentukan segala keputusan yang menyangkut atau memengaruhi hidupnya (Surbakti, 2010: 180). Asumsi yang mendasari terjadinya partisipasi ini ialah orang yang paling tahu tentang apa yang baik bagi dirinya adalah orang itu sendiri (Berger, 1976: 60). Oleh karena itu Dia bersuara atau bergerak melakukan sesuatu untuk berpartisipasi dan tentu saja tiap-tiap masyarakat tersebut melakukannya dengan cara yang berbeda-beda.

Partisipasi politik masyarakat hari ini jelas berbeda dengan yang pernah terjadi di masa-masa yang lalu. Perkembangan sistem teknologi informasi atau kehadiran media sosial secara bertahap telah mengubah cara-cara berkomunikasi maupun mendapatkan informasi (Beatrice, 2021: 95). Penggunaan media sosial sebagai saluran utama dalam mencari atau bertukar informasi akhir-akhir ini semakin menyita perhatian. Hal ini salah satunya disebabkan oleh kenyataan bahwa satu *post*/kiriman di media sosial memiliki magnitudo yang besar sebagai akibat dari luasnya konektivitas atau ketersambungan antar saluran media sosial dan ditambah respon yang beraneka ragam—dipengaruhi oleh keragaman latar belakang sosial-budaya, ekonomi, maupun pendidikan pembaca.

Media sosial menjadi saluran utama bagi masyarakat dalam mencari dan bertukar informasi. Melalui medium ini hasrat, keingintahuan, kebutuhan, maupun harapan akan demokrasi yang lebih representatif bukan tidak mungkin diwujudkan. Hal ini dimungkinkan karena beberapa hal: *Pertama*, terbukanya ruang percakapan warga negara secara bebas—ruang untuk bersuara bagi mereka yang sebelumnya tidak mampu bersuara (Olaniran-William, 2020:77), termasuk urusan politik dan kebijakan publik. *Kedua*, pada derajat yang lain media sosial mampu membuka jalan baru bagi media yang independen serta mampu menurunkan ketidakseimbangan informasi yang ada (Earl & Kimport, 2011:2).

Beberapa kriteria tersebut mendorong argumentasi para akademisi maupun pakar bahwa kehadiran media sosial ini merupakan suatu “kelahiran kembali” ruang publik (Fernback, 1997:35) bagi masyarakat di era digital. Dalam konstruksinya media sosial merupakan yang paling mendekati idealnya ruang publik (Green, 2002: 120) karena kontrol negara terhadap ruang publik ini terbatas bila dibanding ruang-ruang publik media arus utama. Ruang digital ini dianggap bentuk baru bagi ruang publik karena kemampuannya mendorong pertukaran gagasan serta opini secara terbuka dalam persamaan hak bagi setiap orang (Cela, 2015: 196).

Ruang publik dan demokrasi deliberatif menjadi satu kesatuan yang tidak dapat terpisah karena demokrasi deliberatif tidak dapat tercipta tanpa adanya ruang publik yang baik. Gagasan ruang publik ini diperkenalkan oleh Jurgen Habermas. Studi mengenai ruang publik ini sangat berkaitan dengan demokrasi, khususnya demokrasi deliberatif. Demokrasi deliberatif ini tidak memusatkan diri pada

penyusunan daftar-daftar aturan, melainkan bagaimana proses menghasilkan aturan-aturan tersebut (Hardiman, 2009: 128). Lebih lanjut maksudnya ialah deliberasi/musyawarah serta komunikasi yang aktif tersebut terjadi antara pemerintah dan masyarakat. Proses deliberasi dan pembuatan pilihan tersebut harus dibangun dengan mengedepankan inklusivitas, rasionalitas, akal sehat dan penuh dengan keberadaban.

Media sosial menjadi ruang publik baru bagi masyarakat—ruang dimana masyarakat dapat terlibat dalam suatu diskusi atau debat yang berkaitan dengan isu-isu publik tertentu. Jurgen Habermas mendefinisikan ruang publik sebagai tempat dimana masyarakat dengan urusan-urusan pribadi datang untuk bertemu pada suatu ruang dan bersepakat pada isu-isu bersama yang bersifat publik (Habermas, 1991:27). Secara esensial negara turut hadir dalam ruang tersebut sebagai pendengar. Sebagai dampak lanjutan, wadah ini memungkinkan terciptanya suatu opini publik yang baik dan dimanifestasikan dalam suatu tindakan lanjutan yang nyata seperti perubahan kebijakan atau bahkan perubahan politik.

Menurut Habermas, ruang publik ini merupakan satu bagian yang tidak terpisahkan dengan demokrasi karena Ia mengakomodir partisipasi masyarakat dalam percakapan antara warga negara yang memiliki kepedulian terhadap negaranya. Percakapan masyarakat pada ruang publik tersebut harus ditopang oleh: *Pertama*, informasi yang dapat dibuktikan kebenarannya. *Kedua*, kesempatan akses yang sama terhadap sumber-sumber informasi, serta *ketiga* kesempatan yang sama bagi masyarakat untuk memberikan pendapatnya secara setara (Kruse, 2017:2).

Komunikasi masyarakat di ruang-ruang publik haruslah mengarah pada suatu klaim valid yang walaupun secara nyata berbeda, tetapi terkait dan saling melengkapi satu sama lain, yakni: klaim kebenaran (*truth*), klaim ketepatan (*rightness*), klaim kejujuran (*sincerety*), dan klaim komprehensibilitas (*comprehensibility*). Dengan terpenuhinya indikator di atas, maka bisa disimpulkan konsensus dalam suatu wacana dapat tercapai (Poespowardjojo, 2016: 167).

Secara spesifik, tercipta, lancar, dan efektifnya percakapan di ruang publik ini dapat dicapai dari seberapa kuat argumen yang dibangun, bagaimana kritik atas argumen tersebut, serta kemampuan untuk menyakinkan lawan mengenai kekuatan dari argumenn-argumen yang telah dibangun dan tentu kesemua hal tersebut dilakukan dengan mengedepankan rasionalitas. Satu yang tidak kalah penting ialah perbincangan tersebut haruslah beralaskan kesamarataan (tanpa hirarki) serta kepastian hukum agar tercipta suatu ketertiban.

Namun tidak bisa dipungkiri bahwa media sosial telah mengalami disrupsi dalam perkembangan akhir-akhir ini. Terciptanya banyak pertarungan wacana atau debat yang tidak substansial sebagai akibat dari semburan misinformasi, disinformasi baik hoaks maupun berita palsu di media sosial. Tentu hal ini memiliki pengaruh tersendiri terhadap kualitas demokrasi. Demokrasi tidak bisa hanya dipandang dalam kacamata kuantitas, namun juga kualitas. Oleh karena itu, dibutuhkan suatu analisis yang baik untuk melihat kembali bagaimana masalah-masalah itu terbentuk, mengatasi sumber masalahnya agar demokrasi yang hadir memang merupakan demokrasi yang merepresentasikan masyarakat secara luas dengan baik.

Sebagai penutup bagian ini telah disajikan sebuah bagan yang bertujuan untuk melengkapi kerangka pemikiran teoretis yang telah disampaikan di atas, serta memudahkan pembaca dalam memahami jalan pemikiran penelitian ini dengan cara yang lebih sederhana. Kerangka pemikiran tersebut dapat dilihat melalui bagan sebagai berikut:



## **1.7 Metode Penelitian**

Metode penelitian menjadi hal yang sangat penting dan ikut menentukan kualitas sebuah penelitian. Maka dari itu, pada bagian akan dilakukan beberapa penjelasan mengenai metode penelitian, tipe penelitian, dan seluruh hal yang berkaitan dengan bagaimana penelitian ini dibangun dan dilaksanakan. Penjelasan tersebut ialah sebagai berikut.

### **1.7.1 Tipe Penelitian**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan etnografi digital. Metode kualitatif mampu mengeksplorasi kedalaman masalah dan maknanya hingga ke akar. Menurut Creswell (2016: 4), penelitian

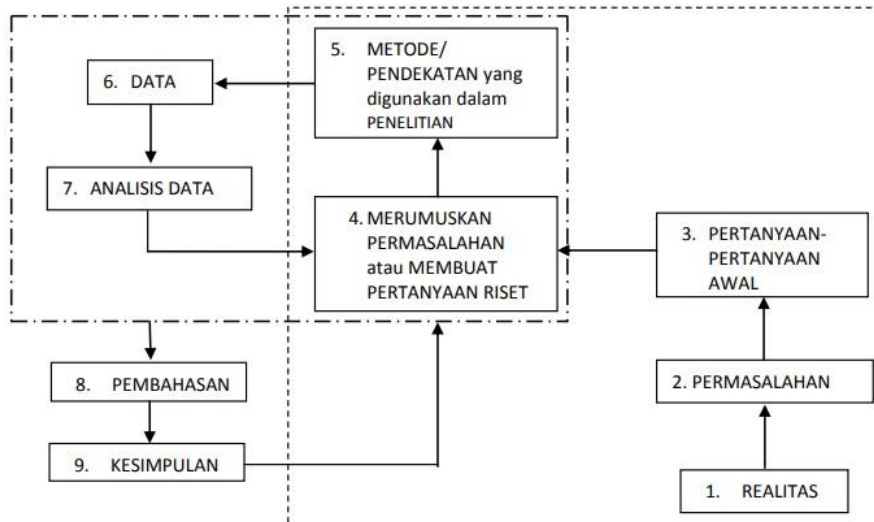
kualitatif merupakan metode yang digunakan untuk mengeksplorasi dan paham makna yang oleh beberapa individu atau sekelompok orang dianggap berasal dari masalah sosial dan kemanusiaan.

Creswell menegaskan bahwa proses penelitian kualitatif melibatkan upaya penting, misalnya bagaimana menghadirkan pertanyaan-pertanyaan penting, misalnya mengajukan pertanyaan-pertanyaan dan prosedur-prosedur, mengumpulkan data, yang spesifik dari para partisipan, menganalisis data secara induktif mulai dari tema-tema yang khusus ke tema-tema yang umum, serta menafsirkan makna data. Selain melakukan wawancara dan observasi secara mendalam dengan narasumber di lapangan secara dalam jaringan (daring) karena melibatkan pendekatan etnografi digital, tidak menutup kemungkinan beberapa data akan dikumpulkan secara luar jaringan (luring).

Etnografi digital pada dasarnya merupakan *transfer* tradisi etnografi sebagai instrumen penelitian yang diwujudkan ke ruang digital internet (Hine, 2008:257). Teknik ini merupakan suatu upaya untuk memotret ruang digital dimana masyarakat beraktivitas di dalamnya. Lebih spesifik, etnografi digital mengeksplorasi konsekuensi dari kehadiran media digital dalam membentuk teknik dan proses yang melaluinya, serta menjelaskan bagaimana dimensi digital, metodologis, praktis, dan teoretis dari penelitian etnografi terjalin.

Kekuatan utama Etnografi Digital terletak pada kemampuannya untuk menyajikan tinjauan teoretis dan berorientasi praktik yang seimbang dari persinggungan antara antropologi dan media digital, lintas disiplin dan di luar akademisi (Pink, 2015: 2). Penelitian dilakukan dengan memunculkan pertanyaan

generatif yang membantu penelitian namun tidak dimaksudkan untuk menjadi dinamis. Kendati demikian, untuk dapat memudahkan dalam mendapatkan gambaran utuh, berikut merupakan kerangka berfikir yang disajikan di bawah ini:



### 1.7.2 Ruang Lingkup

Penelitian ini berkisar pada gambaran nyata bahwa masyarakat di era digital tidak bisa dilepaskan dari media sosial tidak terkecuali Tiktok, baik dalam kaitannya sebagai sumber informasi, media interaksi, maupun aktivitas lain yang mampu mempengaruhi pengambil keputusan. Media sosial yang disebut-sebut ruang publik baru bagi masyarakat—ruang publik digital yang memungkinkan deliberasi, diskusi, maupun debat. Ruang publik ini merupakan sesuatu yang integral dengan demokrasi atau tidak bisa dipisahkan.

Dalam konsep Jurgen Habermas ini, ruang publik ini merupakan titik temu atau ruang tengah antara masyarakat dan negara. Oleh karena itu, ruang publik ini haruslah berisi percicangan yang hangat dan pertukaran informasi yang baik.



Argumen-argumen yang dibangun dalam tujuan yang persuasif harus didasari informasi yang benar—sesuai fakta dan dengan mengedepankan rasionalitas.

Sementara itu, ruang publik digital belakangan dipenuhi dengan disinformasi politik yang hanya melahirkan pertukaran wacana yang tidak substansial atau debat kusir. Tidak berhenti di situ, masalah ini juga berpotensi memecah belah masyarakat serta merusak nilai-nilai demokrasi. Hal ini disebabkan oleh setiap argumen yang dibangun tidak dengan informasi yang benar, sehingga mendistorsi percakapan dan mengarah pada sisi negatif, bahkan berpotensi merusak persatuan dan demokrasi. Demokrasi tidak bisa dipandang hanya dalam perspektif teknis pelaksanaan, namun berkaitan dengan nilai. Disinformasi politik ini terjadi dan mengambil tempat di berbagai *platform* media sosial.

Penelitian ini memusatkan perhatiannya pada bagaimana mekanisme disinformasi politik dalam isu-isu terkait bakal calon peserta pemilihan umum di Tiktok dan disrupsi terhadap demokrasi Indonesia. Selain menggunakan Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagai salah satu momen refleksi, penelitian ini juga melakukan penelusuran perkembangan isu-isu terkini dalam penggunaan tagar terkait. Tiktok di sisi lain merupakan platform yang dalam tahun-tahun terakhir merupakan platform yang paling banyak diunduh dan digunakan, serta berpotensi menjadi platform kunci dalam kampanye politik menjelang Pemilihan Umum Tahun 2024.

### **1.7.3 Fenomena Penelitian**

Semburan berita bohong tentu berbahaya bagi ekosistem ruang publik yang diidealkan oleh Jurgen Habermas. Selain karena memang sesuatu yang integral dari

demokrasi secara nilai, secara praktik ruang publik ini juga sangat signifikan karena melibatkan partisipasi aktif masyarakat melalui perbincangan, musyawarah, pertukaran pendapat maupun debat, yang akhirnya menghasilkan sebuah opini publik. Namun disinformasi politik digital ini membuat percakapan masyarakat menjadi tidak substansial, karena dibangun berdasarkan informasi yang salah.

Temuan penelitian terdahulu telah memperlihatkan bahwa polarisasi terjadi akibat isu-isu SARA dan sektarianisme yang dibangun pada media sosial dalam bentuk disinformasi politik yang sangat meyakinkan. Dapat berupa foto, *audio*, maupun *video* yang telah melewati serangkaian rekayasa digital. Tidak khas terjadi pada satu media sosial saja, namun pada beberapa dan bahkan beberapa di antaranya memperlihatkan ketersambungan dalam hal penyebaran konten. Selain itu, spektrum generasi juga ikut berpengaruh dan memiliki andil tersendiri dalam kerangka masalah ini. Oleh karena itu, wawancara mendalam baik secara daring maupun luring dengan pengguna media sosial lintas generasi menjadi penting.

#### **1.7.4 Jenis dan Sumber Data**

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder, yang ialah sebagai berikut:

- A. Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung oleh peneliti melalui wawancara maupun observasi mendalam langsung dengan pengguna media sosial Tiktok. Selanjutnya dilakukan analisis isu, kreator, klasifikasi generasi, dan ikut terjun berbicara langsung dalam kelompok kreator dalam fitur siaran langsung (*live*). Berbaur langsung dengan para pelaku dan mengajukan pertanyaan terkait, merupakan ciri

dari etnografi itu sendiri Harapannya temuan akan menjadi lebih banyak dan jauh lebih otentik.

- B. Data sekunder adalah data yang dalam hal ini bersumber dari teknis—foto, *video*, tangkapan pembicaraan di media sosial, jurnal, buku-buku yang bersifat teori, peraturan produk hukum, tulisan-tulisan ilmiah yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

### **1.7.5 Pemilihan Informan**

Informan merupakan orang yang diminta untuk memberikan informasi mengenai sesuatu—situasi, kondisi, dan juga latar belakang penelitian yang sedang dilaksanakan. Penentuan informan dilakukan secara *purposively*, yaitu informan yang diwawancarai dalam penelitian ini adalah orang-orang yang memiliki pengetahuan mengenai topik penelitian sehingga dapat memberikan informasi yang selengkap-lengkapnyanya. Merujuk kepada hal tersebut, penelitian ini mengambil beberapa informan yang adalah sebagai berikut:

- a. Pengguna media sosial aktif Tiktok: lintas generasi X, Y, Z. Masing-masing generasi 10 orang. Total 30 orang.
- b. Pengguna yang merupakan kreator konten disinformasi politik 5 orang.

### **1.7.6 Instrumen Penelitian**

Dalam tujuan mencapai keberhasilan penelitian, dibutuhkan instrumen-instrumen. Peneliti bertindak sebagai instrumen itu sendiri—sebagai pengumpul data dan informasi di lapangan. Pekerjaan tersebut dipermudah dengan penggunaan beberapa alat seperti telepon pintar dapat sebagai media dokumentasi berbagai

data/keperluan, perekam suara, laptop, dan aplikasi lain yang dibutuhkan untuk keperluan etnografi digital

### **1.7.7 Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data penelitian ini melibatkan prosedur pengumpulan data kualitatif seperti wawancara dengan pengguna Tiktok lintas generasi, kreator konten disinformasi, ikut bergabung dalam siaran langsung (*live*) dalam suatu format grup diskusi dengan isu yang ditentukan utamanya terkait dengan bakal calon peserta Pemilu 2024. Untuk tercapainya suatu pemahaman yang lebih baik, berikut ini merupakan penjelasan teknik tersebut.

#### **1.7.7.1 Observasi**

Observasi merupakan proses yang tergolong sederhana dimana proses pengamatan fenomena langsung dilakukan terhadap suatu masalah. Pengamatan terhadap konten-konten Tiktok dengan isu terkait. Teknik ini dapat dilakukan dengan teknis; peneliti murni sebagai pengamat atau dapat juga peneliti sebagai partisipan (peneliti juga ikut di dalam aktivitas atau fenomena yang sedang diamati (Matthews, 2010: 257). Dalam teknis yang lebih terperinci, teknik observasi dalam pendekatan etnografi digital ini dilakukan secara *online* dengan menelusuri berbagai sumber data (pengguna/kreator, konten: VT, *live*) di Tiktok.

Pengamatan secara *online* dapat dimulai dari sumber digital seperti riwayat percakapan dengan tema terfokus pada Tiktok menggunakan riwayat *jahitan* (*stich*) *video*, kata kunci tertentu seperti #Pemilu2024 #PemilihanUmum2024, #GanjarPranowo2024, #AniesBaswedan2024, dan #Presiden2024. Selain itu

tangkapan layar, foto, *video*, cuplikan berita, rilis media massa, hingga dengan aktif memantau akun Tiktok yang memiliki *impact* besar dalam percakapan dalam isu terkait. Selain itu observasi juga dapat dilakukan dengan ikut masuk dalam percakapan yang ada, dengan harapan observasi partisipatoris mampu meningkatkan pengumpulan data.

#### **1.7.7.2 Wawancara**

Wawancara merupakan teknik pengumpulan informasi melalui interaksi dengan orang lain dalam cara yang bervariasi (Kumar, 2011: 115). Wawancara yang ada dilakukan secara mendalam dengan pola tidak terstruktur—dalam sifat pertanyaan terbuka dengan harapan agar sesi mampu menghadirkan informasi dan petunjuk tertentu yang penting dalam tujuan memperoleh hasil penelitian yang relevan. Selain itu dengan metode ini diharapkan agar informan memberikan informasi yang tidak terbatas, sehingga kekayaan informasi membuat proses analisis menjadi komprehensif. Wawancara dilakukan dengan orang-orang yang memiliki pemahaman baik secara praktis maupun teoritis—yakni pengguna Tiktok dengan klasifikasi kelompok usia tertentu dan juga peneliti/akademisi.

#### **1.7.7.3 Dokumentasi**

Dokumentasi dalam penelitian ini dilakukan dengan jalan mengumpulkan bahan-bahan dalam bentuk dokumen yang relevan dengan tema penelitian. Dapat berupa buku, artiker, jurnal, laporan maupun dokumen lainnya yang relevan dengan tema penelitian. Selain itu dokumentasi ini juga dapat atau tentang orang-orang dan hal-hal yang dihasilkan melalui serangkaian proses seperti film, kaset audio dan

video (Matthews, 2010: 277), termasuk di dalamnya karya seni, materi di media sosial, maupun sarana lain yang tersedia di dalam di media digital terkait.

Dokumentasi dan kepustakaan bertujuan agar peneliti menjadi lebih mudah dalam mempersiapkan data maupun referensi pendukung terkait tema penelitian. Sebagai tambahan, sistem ini juga memungkinkan terciptanya suatu pengarsipan, mengingat hal ini penting bagi peneliti dan peneliti-peneliti lain dalam pertukaran maupun diskusi data. Dokumentasi ini tidak hanya dalam sebatas pengumpulan, namun juga analisis terhadapnya.

#### **1.7.7.4 Penelitian Kepustakaan (*Desk Study*)**

Pengumpulan data, buku, jurnal, majalah, surat kabar, opini, rilis, laporan dll yang relevan tentu sangat menunjang dalam memperkaya teori, informasi, serta wawasan, termasuk juga memberikan kebaruan dalam penelitian. Hal tersebut dapat dicapai dengan mengumpulkan dan memeriksa serta menganalisis, sehingga penelitian yang sedang dibangun dan tulisan/penelitian ilmiah terdahulu dapat saling melengkapi.

#### **1.7.8 Teknik Analisis Data**

Analisis data mungkin dilakukan simultan dalam proses lain (Creswell, 2018: 267). Data yang telah dikumpulkan diolah, dikelompokkan, dan kemudian dianalisis untuk disimpulkan sebagai hasil penelitian. Tahap analisis data dilakukan dengan melakukan analisis isu dalam tagar, konten, pola konten kreator disinformasi, riwayat wawancara, serta temuan lain yang menunjang.

Tahap analisis ini bertujuan sebagai modal utama dalam melakukan penulisan laporan pada tahap selanjutnya. Analisis yang dilakukan tidak terlepas dari rujukan dan penggunaan teori yang relevan serta penelitian terdahulu yang mempunyai hubungan dengan penelitian ini. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah mengacu pada konsep Milles dan Haberman yaitu *Interactive model* dalam tiga tahap, yaitu: Reduksi Data, yang merupakan proses pemilahan—penyederhanaan, abstraksi, dan transformasi yang timbul selama proses di lapangan. Penyortiran bentuk konten dan isu yang digunakan di dalam konten. Hal ini dapat dicapai dengan penggunaan tagar secara manual. Hal ini disebabkan tidak memungkinkannya pemanenan data secara otomatis di Tiktok layaknya Twitter.

Selanjutnya Penyajian Data. Proses ini menyajikan segala temuan data, dalam hal ini bentuk teks-teks naratif yang telah diekstrak dari berbagai konten yang telah dikumpulkan. Terakhir, Penarikan Kesimpulan. Pada tahap ini dilakukan pengungkapan dan pemaknaan terhadap data-data yang ada, baik data yang didapat melalui pengamatan maupun wawancara dengan kreator konten disinformasi politik, maupun narasumber pengguna Tiktok dalam kelompok usia/generasi dengan tema politik. Proses akhir ini dilakukan dengan tidak melewatkan analisis dan penarikan kesimpulan yang masih berpegang pada teori-teori yang digunakan.